

Kebijakan Kontroversial Ibu Kota Nusantara

Mungin^{1*}, Iswiyati Rahayu², Irawanto³

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Al-Banjari

*Penulis korespondensi: munginm77@gmail.com

Abstract. *The development of the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan is a strategic national policy that has sparked controversy because it brings together narratives of development, modernization, and economic equality with ecological and social issues. This study employs a qualitative approach through policy analysis and literature review to examine the government's narrative construction, ecological impacts, threats to environmental sustainability, and the contradictions between claims of sustainable development and ecological realities. The findings indicate that the IKN development narrative is hegemonic as it emphasizes economic growth, modernization, and the Indonesia 2045 Vision, yet it lacks public participation and fails to adequately address the critiques of indigenous communities and environmental experts. IKN development also has the potential to cause systemic ecological impacts, such as deforestation, the loss of endemic wildlife habitats, increased carbon emissions from peatland conversion, and heightened risks of flooding and forest fires. Furthermore, IKN development policies threaten environmental sustainability as they are not yet fully grounded in ecological carrying capacity assessments and the protection of vulnerable areas. This study employs a qualitative approach through policy analysis and a literature review to examine the construction of the government's narrative and its ecological impacts. The study concludes that there is a contradiction between the claim that the IKN is a sustainable city and development practices that are potentially exploitative. Therefore, development governance that is transparent, participatory, accountable, and based on ecological sustainability is required.*

Keywords: *IKN; Political Ecology; Indigenous Peoples; Sustainable Development; Environmental Sustainability.*

Abstrak. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang menimbulkan kontroversi karena mempertemukan narasi pembangunan, modernisasi, dan pemerataan ekonomi dengan persoalan ekologis serta sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan dan studi literatur untuk mengkaji konstruksi narasi pemerintah, dampak ekologis, ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, serta kontradiksi antara klaim pembangunan berkelanjutan dan realitas ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi pembangunan IKN bersifat hegemonik karena menekankan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan Visi Indonesia 2045, tetapi masih minim partisipasi publik serta kurang mengakomodasi kritik masyarakat adat dan ahli lingkungan. Pembangunan IKN juga berpotensi menimbulkan dampak ekologis sistemik, seperti deforestasi, hilangnya habitat satwa endemik, peningkatan emisi karbon dari alih fungsi lahan gambut, serta meningkatnya risiko banjir dan kebakaran hutan. Selain itu, kebijakan pembangunan IKN mengancam keberlanjutan lingkungan karena belum sepenuhnya berbasis kajian daya dukung ekologis dan perlindungan kawasan rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi antara klaim IKN sebagai kota berkelanjutan dengan praktik pembangunan yang berpotensi eksploitatif. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berbasis keberlanjutan ekologis.

Kata kunci: IKN (Ibu Kota Nusantara); Ekologi Politik; Masyarakat Adat; Pembangunan Berkelanjutan; Keberlanjutan Lingkungan.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang menempati posisi penting dalam dinamika administrasi publik Indonesia kontemporer. Kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknokratis untuk mengurangi beban Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, dan penurunan muka tanah, tetapi juga sebagai agenda pembangunan

nasional yang membawa narasi modernisasi, pemerataan ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam konstruksi kebijakan pemerintah, IKN diposisikan sebagai simbol kota masa depan yang cerdas, hijau, berkelanjutan, dan merepresentasikan visi pembangunan Indonesia menuju 2045. Narasi ini menempatkan pembangunan IKN sebagai solusi multidimensional terhadap persoalan spasial, ekonomi, dan administratif yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun, dalam perspektif administrasi publik, setiap kebijakan berskala besar tidak cukup dinilai dari tujuan normatifnya, melainkan juga dari proses perumusan, legitimasi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta dampak implementasinya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Di balik narasi pembangunan tersebut, kebijakan IKN memunculkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan dampak ekologis dan sosial. Pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah Kalimantan Timur berpotensi menimbulkan deforestasi, alih fungsi lahan, fragmentasi habitat satwa endemik, peningkatan emisi karbon, serta kerentanan terhadap banjir dan kebakaran hutan. Selain itu, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki hubungan historis, sosial, dan kultural dengan ruang hidupnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara narasi pembangunan yang menekankan kemajuan dan keberlanjutan dengan realitas ekologis yang memperlihatkan risiko kerusakan lingkungan. Dalam konteks administrasi publik, ketegangan ini penting dikaji karena menyangkut kualitas tata kelola kebijakan, transparansi proses pengambilan keputusan, keterlibatan publik, serta kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup.

Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa, kepentingan politik, dan konstruksi wacana tertentu. Oleh karena itu, pembangunan IKN perlu dianalisis tidak hanya sebagai proyek fisik pemindahan ibu kota, tetapi juga sebagai praktik kebijakan yang memperlihatkan bagaimana negara membangun legitimasi, mengelola kritik, dan merespons persoalan ekologis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi narasi pembangunan IKN oleh pemerintah, mengidentifikasi dampak ekologis yang ditimbulkan, serta mengkaji kontradiksi antara klaim IKN sebagai kota berkelanjutan dan realitas ekologis yang menyertainya.

Penelitian mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi penting untuk dilakukan karena proyek ini bukan hanya sekadar kebijakan pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki dampak luas terhadap tata

kelola administrasi publik, lingkungan hidup, dan masyarakat lokal. Dalam konteks administrasi publik, pembangunan IKN memperlihatkan bagaimana negara membangun legitimasi kebijakan melalui narasi pembangunan, modernisasi, dan pemerataan ekonomi, sekaligus menghadapi kritik terkait transparansi, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena pembangunan IKN berada di tengah perdebatan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan ekologis. Pemerintah membingkai IKN sebagai “smart forest city” dan simbol pembangunan berkelanjutan, namun di sisi lain berbagai kajian menunjukkan adanya potensi deforestasi, alih fungsi lahan gambut, hilangnya habitat satwa endemik, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kontradiksi antara narasi kebijakan yang dibangun pemerintah dengan realitas ekologis di lapangan.

Penelitian ini penting karena pembangunan IKN berpotensi memunculkan persoalan tata kelola kebijakan publik, terutama terkait proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang partisipatif dan cenderung top-down. Minimnya keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa kebijakan strategis nasional masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi kebijakan dan keberhasilan implementasi pembangunan jangka panjang.

Kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis bagaimana narasi pembangunan IKN dikonstruksi oleh pemerintah, mengidentifikasi dampak ekologis yang ditimbulkan, menelaah potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, serta mengungkap kontradiksi antara klaim pembangunan berkelanjutan dengan realitas ekologis yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait environmental governance, kebijakan pembangunan, dan tata kelola pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembangunan dan Ekologi Politik

Kajian mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik antara paradigma pembangunan ekonomi dan pendekatan ekologi politik. Dalam paradigma developmentalisme, pembangunan dipahami sebagai proses modernisasi yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur

sebagai prioritas utama negara. (Schumpeter, 1934) Menjelaskan bahwa pembangunan terjadi melalui inovasi dan proses *creative destruction*, yaitu perubahan besar yang mendorong transformasi ekonomi melalui penggantian sistem lama dengan sistem baru. Sementara itu, (Rostow, 1960) melalui teori *The Stages of Economic Growth* menempatkan pembangunan sebagai tahapan linear menuju masyarakat modern dan industri maju.

Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki legitimasi untuk menjalankan proyek-proyek strategis nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Pembangunan IKN dapat dipahami sebagai manifestasi paradigma developmentalisme karena diproyeksikan sebagai simbol modernisasi nasional, pemerataan ekonomi, serta transformasi Indonesia menuju negara maju tahun 2045. Pemerintah membingkai IKN sebagai “smart city” dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya. (Anirwan dkk., 2024)

Paradigma pembangunan tersebut mendapat kritik dari pendekatan ekologi politik. (Robbins, 2012) (Peet & Watts, 2004) menjelaskan bahwa pembangunan tidak pernah bersifat netral karena selalu melibatkan relasi kuasa, perebutan sumber daya, dan konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Ekologi politik menolak asumsi bahwa pembangunan selalu menghasilkan kesejahteraan kolektif, sebab dalam praktiknya pembangunan sering kali menciptakan ketimpangan ekologis dan sosial.

Pendekatan ekologi politik memandang bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar akibat teknis pembangunan, melainkan hasil dari struktur kekuasaan yang memprioritaskan akumulasi ekonomi dibanding keberlanjutan ekologis. Dalam konteks IKN, pembangunan infrastruktur skala besar di kawasan hutan dan lahan gambut menunjukkan bagaimana kepentingan pembangunan nasional berpotensi mengorbankan daya dukung lingkungan. Relasi kuasa negara dan investor dalam proyek IKN juga memperlihatkan adanya dominasi kebijakan yang cenderung mengabaikan masyarakat adat serta kelompok lokal yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Teori *Environmental Justice* atau keadilan lingkungan yang dikembangkan (Martinez-Alier, 2002) menjelaskan bahwa dampak kerusakan lingkungan sering kali ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok marginal, seperti masyarakat adat, petani lokal, dan komunitas miskin. Proyek pembangunan berskala besar umumnya menghasilkan distribusi manfaat dan risiko yang tidak seimbang. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik memperoleh keuntungan pembangunan, sementara masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidup, akses sumber daya, dan keamanan ekologis.

Dalam pembangunan IKN, persoalan ketimpangan lingkungan terlihat dari potensi konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat Dayak dan Kutai, serta hilangnya akses masyarakat terhadap hutan dan lahan tradisional.(Syaban & Appiah-Opoku, 2024) Dengan demikian, teori pembangunan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya persoalan administratif dan ekonomi, tetapi juga arena kontestasi kekuasaan, kepentingan, dan keberlanjutan lingkungan.

Konsep Narasi Kebijakan dan Analisis Wacana

Untuk memahami bagaimana pembangunan IKN memperoleh legitimasi publik, penelitian ini menggunakan konsep narasi kebijakan dan analisis wacana kritis. (Foucault, 1972) menjelaskan bahwa wacana tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang membentuk pengetahuan, kebenaran, dan cara masyarakat memahami realitas. Dalam perspektif ini, negara memiliki kemampuan untuk membangun narasi tertentu guna memperoleh legitimasi terhadap kebijakan yang dijalankan.

Narasi pembangunan IKN dibangun melalui istilah-istilah seperti “kota masa depan”, “smart forest city”, “kota berkelanjutan”, dan “simbol transformasi Indonesia”. Wacana tersebut membentuk persepsi publik bahwa pembangunan IKN merupakan kebutuhan nasional yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, bahasa kebijakan menjadi instrumen politik yang digunakan untuk memperkuat legitimasi negara.

Fairclough (Fairclough, 1995) melalui *Critical Discourse Analysis* menjelaskan bahwa bahasa dalam kebijakan publik tidak pernah netral karena selalu mengandung kepentingan ideologis tertentu. Analisis wacana kritis digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah memproduksi narasi pembangunan yang dominan, sementara kritik ekologis dan sosial sering kali ditempatkan sebagai hambatan terhadap kemajuan. Dalam konteks ini, media massa juga memiliki peran penting dalam mereproduksi narasi resmi pemerintah sehingga memperkuat hegemoni kebijakan pembangunan.

Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah membingkai IKN sebagai solusi multidimensional terhadap persoalan nasional, meskipun di sisi lain terdapat berbagai persoalan ekologis dan konflik sosial yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, pembangunan IKN tidak hanya berlangsung pada level fisik, tetapi juga pada level produksi wacana dan legitimasi politik.

Keberlanjutan dan Kritik terhadap Paradigma Pertumbuhan

Penelitian ini juga menggunakan teori keberlanjutan untuk menganalisis kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam proyek IKN. Meadows (Meadows dkk., 1972) melalui *The Limits to Growth* menegaskan bahwa model pembangunan berbasis pertumbuhan tanpa batas (*business as usual*) akan menghadapi keterbatasan ekologis karena sumber daya alam memiliki daya dukung yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali berpotensi menghasilkan krisis lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem.

Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian diperkuat melalui laporan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ini menjadi dasar dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan integrasi antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Raworth (Raworth, 2017) melalui konsep *Doughnut Economics* mengkritik paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak melampaui batas ekologis planet dan tetap menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks IKN, konsep ini penting untuk menilai apakah pembangunan benar-benar dilakukan dalam batas daya dukung lingkungan atau justru memperbesar tekanan terhadap ekosistem Kalimantan.

Teori keberlanjutan digunakan untuk menjelaskan adanya kontradiksi antara klaim pemerintah mengenai IKN sebagai kota hijau dan realitas pembangunan yang berpotensi menghasilkan deforestasi, emisi karbon, kerusakan gambut, serta hilangnya biodiversitas. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat dipahami sebagai bentuk pertarungan antara paradigma pertumbuhan ekonomi dan prinsip keberlanjutan ekologis dalam kebijakan publik Indonesia kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan dan studi literatur. (Hasan dkk., 2025) Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam dinamika sosial, politik, dan ekologis yang melatarbelakangi kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Creswell (Creswell, 2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, relasi kuasa, dan konstruksi sosial di balik suatu fenomena kebijakan. Sementara itu, Yin (2014)

menjelaskan bahwa analisis kebijakan dalam studi kasus relevan digunakan untuk menelaah kebijakan publik yang kompleks dan kontekstual, seperti pembangunan IKN yang melibatkan kepentingan negara, masyarakat, lingkungan, dan sektor ekonomi.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana narasi pembangunan IKN dikonstruksi oleh pemerintah, bagaimana dampak ekologis dipahami dalam berbagai dokumen dan kajian ilmiah, serta bagaimana kontradiksi antara klaim pembangunan berkelanjutan dan realitas ekologis muncul dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif administrasi publik untuk melihat proses legitimasi kebijakan, tata kelola pembangunan, dan relasi antara negara dengan masyarakat dalam proyek strategis nasional.

Penelitian menggunakan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan pembangunan IKN. Data penelitian terdiri atas:

- a. Dokumen resmi pemerintah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Rencana Induk IKN, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis konstruksi narasi pembangunan, orientasi kebijakan pemerintah, serta komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan. Analisis terhadap dokumen resmi menunjukkan adanya kecenderungan dominasi narasi pembangunan ekonomi dan modernisasi dibandingkan perhatian terhadap daya dukung ekologis.
- b. Laporan organisasi lingkungan dan kajian akademik, seperti laporan Walhi, ICEL, serta penelitian akademik terkait ekologi politik dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi dampak ekologis, konflik agraria, serta kritik terhadap tata kelola lingkungan dalam pembangunan IKN. Kajian tersebut menunjukkan bahwa berbagai proyek strategis nasional sering kali menghadapi persoalan lemahnya perlindungan lingkungan dan minimnya partisipasi publik.
- c. Media massa dan opini publik, baik media arus utama maupun media alternatif, digunakan untuk melihat bagaimana narasi pembangunan IKN direproduksi dan diperdebatkan di ruang publik. Analisis media digunakan untuk mengidentifikasi dominasi wacana pemerintah, framing pembangunan, serta munculnya kritik ekologis dan sosial terhadap proyek IKN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur.(Abdussamad & Sik, 2021) Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan, regulasi, laporan resmi, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan IKN. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan teori pembangunan, ekologi politik, administrasi publik, dan pembangunan berkelanjutan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kritis dengan pendekatan analisis kebijakan dan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi narasi pembangunan yang muncul dalam dokumen kebijakan pemerintah terkait IKN. Tahap kedua dilakukan dengan menganalisis dampak ekologis pembangunan berdasarkan kajian ilmiah dan laporan lingkungan. Tahap ketiga dilakukan dengan mengkaji kontradiksi antara klaim pembangunan berkelanjutan dengan realitas ekologis dan sosial yang muncul di lapangan.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (Fairclough, 1995) untuk melihat bagaimana bahasa dan narasi kebijakan digunakan oleh negara dalam membangun legitimasi pembangunan IKN. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa wacana pembangunan tidak bersifat netral, melainkan mengandung relasi kuasa dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan IKN, tetapi juga mengkritisi praktik tata kelola pembangunan dan implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Pembangunan dalam Kebijakan IKN

Visi “Smart Forest City” dan Janji Pemerataan Ekonomi

Pemerintah Indonesia membangun narasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai representasi kota masa depan yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Dalam Rencana Induk IKN Tahun 2022, IKN diproyeksikan sebagai *smart forest city* yang mengintegrasikan teknologi, pembangunan rendah karbon, dan keberlanjutan lingkungan dengan target 75% kawasan hijau.(Nurron dkk., 2025a) Narasi tersebut digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan pemindahan ibu kota sekaligus membangun citra bahwa pembangunan IKN merupakan solusi atas berbagai persoalan pembangunan nasional, seperti ketimpangan wilayah, kepadatan Jakarta, dan ketidakseimbangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.

Dalam perspektif administrasi publik, narasi pembangunan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan bahasa kebijakan untuk membangun legitimasi dan memperoleh dukungan publik terhadap proyek strategis nasional. Pemerintah tidak hanya memosisikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol transformasi Indonesia menuju negara maju tahun 2045. Wacana “kota hijau”, “kota pintar”, dan “kota berkelanjutan” menjadi instrumen politik untuk membentuk persepsi bahwa pembangunan IKN merupakan bentuk kemajuan nasional yang tidak dapat ditolak.

Namun demikian, di balik narasi tersebut terdapat berbagai kontradiksi ekologis dan sosial. Kajian (WALHI, 2023) menunjukkan bahwa definisi kawasan “hijau” dalam pembangunan IKN tidak sepenuhnya merujuk pada ekosistem hutan alami, melainkan juga mencakup perkebunan monokultur, ruang terbuka buatan, dan kawasan reklamasi tambang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsep *smart forest city* lebih banyak dibangun sebagai citra pembangunan dibandingkan realitas ekologis yang sebenarnya.

Program penanaman pohon yang dipromosikan pemerintah juga menimbulkan kritik karena didominasi oleh spesies cepat tumbuh seperti akasia, bukan vegetasi endemik Kalimantan yang memiliki fungsi ekologis lebih kuat. (Noor, 2014) Dalam perspektif keberlanjutan lingkungan, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih cenderung bersifat teknokratis dan simbolik, bukan berbasis pada restorasi ekologis yang komprehensif.

Narasi pemerataan ekonomi yang menjadi dasar legitimasi pembangunan IKN juga menunjukkan kontradiksi dalam implementasinya. Pemerintah mengklaim bahwa pembangunan IKN akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan mengurangi ketimpangan pembangunan nasional. Akan tetapi, data (SMERU Research Institute, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 82% kontrak konstruksi pembangunan IKN dikuasai perusahaan besar dari Jawa dan Bali, sementara tenaga kerja lokal yang terserap hanya sekitar 12%. Di sisi lain, kenaikan harga tanah sebesar 300–700% di kawasan sekitar IKN menyebabkan masyarakat lokal semakin terpinggirkan dari ruang hidupnya sendiri.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi menghasilkan ketimpangan baru antara kelompok pemodal dan masyarakat lokal. Prediksi Bank Dunia (2023) mengenai munculnya efek *trickle-up economics*, di mana sebagian besar manfaat ekonomi justru dinikmati investor dan kelompok ekonomi besar, memperlihatkan bahwa proyek IKN lebih dekat dengan kepentingan akumulasi modal dibandingkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif (Harvey, 2005) kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *accumulation by dispossession*, yaitu proses pembangunan yang menghasilkan

akumulasi keuntungan melalui penguasaan ruang dan sumber daya alam dengan mengorbankan kelompok masyarakat rentan.

Dengan demikian, visi *smart forest city* dan janji pemerataan ekonomi dalam pembangunan IKN menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi kebijakan dan realitas implementasi. Pembangunan yang diklaim berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan justru memperlihatkan kecenderungan eksploitatif terhadap lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal. Hal ini memperkuat kritik bahwa pembangunan IKN masih didominasi paradigma developmentalisme yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dibandingkan perlindungan ekologis dan keadilan sosial.

Pembingkaian IKN sebagai Solusi Multidimensi

Pemerintah membingkai pembangunan IKN sebagai solusi multidimensional terhadap berbagai persoalan nasional. Dalam berbagai pidato resmi dan dokumen kebijakan, IKN dipresentasikan sebagai jawaban atas persoalan kepadatan Jakarta, ketimpangan pembangunan wilayah, krisis lingkungan perkotaan, hingga simbol transformasi Indonesia menuju negara maju. Pembingkaian tersebut memperlihatkan bagaimana negara menggunakan narasi pembangunan untuk membangun optimisme publik sekaligus memperkuat legitimasi politik terhadap proyek strategis nasional.

Analisis framing Tempo Institute (2023) terhadap 524 pidato pejabat negara menunjukkan bahwa sekitar 82% narasi pemerintah menggunakan diksi seperti “solusi total”, “transformasi nasional”, dan “masa depan Indonesia”. Selain itu, sekitar 67% pidato mengaitkan pembangunan IKN dengan legitimasi kepemimpinan nasional dan keberhasilan agenda pembangunan pemerintah. Sebaliknya, hanya sebagian kecil pidato yang membahas risiko ekologis, keterbatasan proyek, atau potensi dampak sosial yang mungkin muncul akibat pembangunan IKN.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan dominasi *narrative governance*, yaitu praktik tata kelola yang mengandalkan konstruksi narasi untuk memperoleh legitimasi kebijakan. Pemerintah membangun framing bahwa pemindahan ibu kota merupakan kebutuhan historis dan simbol kemajuan bangsa, sehingga kritik terhadap proyek IKN sering kali diposisikan sebagai bentuk resistensi terhadap pembangunan nasional.

Namun demikian, narasi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh kondisi empiris di lapangan. Kajian (LIPI, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 65% kawasan IKN memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan risiko likuifaksi. Selain itu, pembangunan di kawasan hutan dan lahan gambut berpotensi memperbesar risiko banjir, degradasi lingkungan,

dan hilangnya biodiversitas. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi pemerintah mengenai kota berkelanjutan dengan kondisi ekologis kawasan pembangunan IKN.

Dalam perspektif analisis wacana kritis, framing pembangunan IKN sebagai solusi multidimensi mencerminkan praktik kekuasaan yang bekerja melalui produksi bahasa dan simbol pembangunan. Negara tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun persepsi publik mengenai makna pembangunan itu sendiri. Narasi “kota masa depan” dan “simbol kemajuan nasional” menjadi alat legitimasi untuk mereduksi kritik ekologis dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, pemingkiaan IKN sebagai solusi multidimensi menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berlangsung pada level material, tetapi juga pada level wacana dan legitimasi politik. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat diproduksi melalui dominasi narasi pembangunan yang cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi dan simbol modernisasi di atas persoalan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Ancaman Ekologis

Deforestasi dan Hilangnya Habitat Endemik

Salah satu persoalan utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem hutan tropis Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur skala besar, pembukaan lahan, pembangunan jalan, kawasan permukiman, dan fasilitas pendukung lainnya berpotensi mempercepat laju deforestasi di kawasan yang selama ini menjadi habitat penting berbagai spesies endemik. (*Tree biodiversity in Bornean lowland forest: What are the key species for forest city development in the new capital city of Indonesia?* | *PLOS One*, t.t.) Dalam perspektif ekologi politik, kondisi ini menunjukkan bagaimana kepentingan pembangunan nasional sering kali bertabrakan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Studi Gaveau (Gaveau & others, 2022) dalam *Nature Sustainability* memproyeksikan hilangnya sekitar 125.000 hektar hutan primer di Kalimantan Timur akibat pembangunan dan ekspansi kawasan IKN. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada perubahan tata ruang administratif, tetapi juga menghasilkan tekanan besar terhadap ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat biodiversitas dunia.

Sekitar 46% kawasan pembangunan IKN diketahui tumpang tindih dengan habitat satwa endemik yang terancam punah, seperti orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus morio*) dan bekantan (*Nasalis larvatus*) yang telah masuk dalam kategori terancam menurut *IUCN Red List*. WWF Indonesia (2023) mencatat adanya penurunan populasi mamalia endemik sekitar

30% akibat fragmentasi habitat dan aktivitas pembangunan di kawasan sekitar IKN. Fragmentasi habitat tersebut menyebabkan terganggunya pola migrasi satwa, berkurangnya sumber makanan alami, serta meningkatnya risiko konflik antara manusia dan satwa liar.

Dalam perspektif administrasi publik, persoalan ini menunjukkan lemahnya integrasi prinsip keberlanjutan ekologis dalam perencanaan pembangunan. Narasi pemerintah mengenai *smart forest city* pada kenyataannya berhadapan dengan praktik pembukaan ruang yang justru mempersempit kawasan hutan alami. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks antara klaim pembangunan hijau dengan realitas eksploitasi ruang ekologis untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Fragmentasi kawasan hutan juga mengancam keberlangsungan sekitar 135 spesies flora dan fauna endemik sebagaimana dijelaskan dalam penelitian). Kerusakan habitat tidak hanya berdampak pada hilangnya biodiversitas, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hilangnya tutupan hutan berpotensi meningkatkan suhu lokal, mengurangi kualitas air, memperbesar risiko erosi, dan menurunkan daya dukung lingkungan kawasan Kalimantan Timur.

Dalam konteks ekologi politik, deforestasi akibat pembangunan IKN menunjukkan bagaimana ruang ekologis diproduksi ulang melalui kepentingan negara dan investasi pembangunan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang ekologis yang harus dilindungi, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikonversi demi kepentingan pembangunan nasional. Akibatnya, kelompok masyarakat lokal dan komunitas adat yang selama ini bergantung pada hutan menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan tradisional.

Dengan demikian, ancaman deforestasi dan hilangnya habitat endemik dalam pembangunan IKN menunjukkan bahwa proyek pembangunan nasional ini memiliki konsekuensi ekologis yang serius. Pembangunan yang diklaim berbasis keberlanjutan justru memperlihatkan kecenderungan eksploitasi lingkungan yang dapat memperdalam krisis ekologis di Kalimantan Timur apabila tidak disertai perlindungan hutan dan konservasi biodiversitas yang ketat.

Emisi dari Alih Fungsi Lahan Gambut

Selain ancaman deforestasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara juga berpotensi meningkatkan emisi karbon akibat alih fungsi lahan gambut. Kawasan gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyimpan karbon alami dalam jumlah besar. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan untuk pembangunan infrastruktur, karbon yang tersimpan selama ratusan tahun akan terlepas ke atmosfer dalam bentuk emisi gas rumah kaca.

Menurut berbagai kajian lingkungan, lahan gambut yang mengalami pengeringan dapat menghasilkan emisi karbon sekitar 55–75 ton CO₂ per hektar setiap tahun. Analisis Carbon Brief (2023) memperkirakan bahwa pembangunan IKN berpotensi melepaskan sekitar 95 juta ton CO₂ ekuivalen dari aktivitas deforestasi dan alih fungsi lahan. Selain itu, aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur diperkirakan menghasilkan tambahan emisi sekitar 12 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun. (Anshari dkk., 2022) Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon nasional.

Dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan lingkungan, kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara komitmen pemerintah terhadap pembangunan rendah karbon dengan praktik pembangunan yang justru menghasilkan tekanan ekologis baru. Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional telah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan implementasi Perjanjian Paris. Akan tetapi, pembangunan IKN justru berpotensi memperbesar pelepasan karbon akibat konversi hutan dan lahan gambut.

Selain persoalan emisi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengakui adanya sekitar 72 titik bekas tambang di kawasan IKN yang berpotensi menjadi sumber sedimentasi, pencemaran air, dan degradasi lingkungan. Bekas kawasan tambang tersebut memperlihatkan bahwa wilayah pembangunan IKN sejak awal telah memiliki persoalan ekologis yang kompleks. Namun demikian, pembangunan tetap dilanjutkan dengan orientasi percepatan pembangunan fisik dan investasi.

Dalam perspektif ekologi politik, alih fungsi lahan gambut menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan sering kali mengabaikan batas ekologis demi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan simbol modernisasi negara. Lahan gambut yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan ekologis strategis justru dikonversi menjadi ruang pembangunan baru. Akibatnya, pembangunan IKN berpotensi memperkuat krisis iklim dan memperbesar kerentanan lingkungan di masa depan.

(IPCC, 2023) bahkan menyebut proyek pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis sebagai bentuk *maladaptation*, yaitu kebijakan adaptasi yang justru menciptakan risiko lingkungan baru. Dalam konteks ini, pembangunan IKN dapat dipahami sebagai paradoks kebijakan pembangunan berkelanjutan, karena proyek yang diklaim ramah lingkungan justru menghasilkan emisi karbon dalam skala besar.

Dengan demikian, alih fungsi lahan gambut dalam pembangunan IKN memperlihatkan adanya kontradiksi antara narasi pembangunan hijau dan realitas ekologis di lapangan.

Pembangunan yang seharusnya mendukung agenda transisi ekologis justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan memperlemah komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.

Kerentanan Bencana

Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kerentanan bencana ekologis. Alih fungsi lahan dalam skala besar untuk pembangunan kawasan perkotaan dan infrastruktur telah mengubah kondisi hidrologis dan keseimbangan ekologis kawasan Kalimantan Timur. Perubahan tata guna lahan tersebut berpotensi memperbesar risiko banjir, erosi tanah, kebakaran hutan, dan degradasi lingkungan lainnya.

Kajian (LIPI, 2023) menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan IKN menyebabkan perubahan signifikan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Alih fungsi lahan meningkatkan debit air permukaan hingga 250% saat musim hujan, sementara tingkat erosi tanah mencapai sekitar 45 ton per hektar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telah mengurangi kemampuan kawasan dalam menyerap air dan menjaga stabilitas tanah.

Selain itu, pengeringan lahan gambut dan berkurangnya tutupan hutan memperbesar risiko kebakaran hutan yang selama ini menjadi persoalan tahunan di Kalimantan. Lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menyebar hingga ke lapisan bawah tanah. Dalam situasi tersebut, pembangunan IKN berpotensi memperburuk siklus kebakaran hutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan lokal, tetapi juga menghasilkan kabut asap lintas wilayah dan peningkatan emisi karbon.

Dalam perspektif administrasi publik, meningkatnya kerentanan bencana menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko ekologis. Kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada percepatan pembangunan fisik dibandingkan penguatan daya tahan lingkungan. Padahal, prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan ekosistem.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks dalam konsep *smart city* yang diusung pemerintah. Kota pintar seharusnya dibangun berdasarkan prinsip ketahanan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, pembangunan IKN justru dilakukan di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi terhadap kebakaran hutan, banjir, dan degradasi lahan. Hal ini menunjukkan bahwa narasi pembangunan modern tidak sepenuhnya diiringi kesiapan ekologis kawasan pembangunan.

Dengan demikian, kerentanan bencana dalam pembangunan IKN memperlihatkan bahwa proyek ini tidak hanya menghadapi tantangan administratif dan ekonomi, tetapi juga persoalan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Jika pembangunan terus dilakukan tanpa pengelolaan ekologis yang ketat, maka IKN berpotensi menjadi kawasan perkotaan baru yang rentan terhadap krisis lingkungan di masa mendatang.

Konflik Sosial-Ekologis

Sengketa Tanah dengan Masyarakat Adat (Dayak dan Kutai)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga memunculkan konflik sosial yang berkaitan dengan penguasaan ruang dan hak atas tanah masyarakat adat. Kawasan Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan IKN sejak lama merupakan ruang hidup masyarakat adat Dayak dan Kutai yang memiliki hubungan historis, sosial, budaya, dan spiritual dengan tanah serta hutan di wilayah tersebut. Dalam perspektif masyarakat adat, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas kolektif dan keberlanjutan kehidupan komunitas.

Namun demikian, proses pembebasan dan penguasaan lahan untuk pembangunan IKN dinilai belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Banyak proses pengadaan tanah dilakukan tanpa konsultasi yang memadai serta tanpa pengakuan kuat terhadap hak ulayat masyarakat lokal. Persoalan ini semakin kompleks karena sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki sertifikat kepemilikan formal atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Akibatnya, posisi masyarakat adat menjadi lemah dalam menghadapi ekspansi pembangunan dan investasi.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *good governance*, khususnya terkait partisipasi publik, transparansi, dan perlindungan kelompok rentan dalam proses kebijakan. Pembangunan IKN cenderung menggunakan pendekatan top-down yang didominasi pemerintah pusat dan kepentingan investasi, sementara keterlibatan masyarakat lokal masih bersifat terbatas. Padahal, kebijakan publik yang berkelanjutan seharusnya dibangun melalui proses deliberatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok yang terdampak langsung.

Selain itu, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjadi standar perlindungan hak masyarakat adat dalam proyek pembangunan belum dijalankan secara optimal. (Hanna & Vanclay, 2013) FPIC menekankan bahwa masyarakat adat harus memperoleh informasi secara utuh, dilibatkan sejak awal, dan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada wilayah hidup mereka. Dalam pembangunan IKN,

banyak masyarakat mengaku tidak memperoleh akses informasi yang cukup mengenai dampak pembangunan maupun mekanisme kompensasi lahan.

Ketidakjelasan proses ganti rugi dan kompensasi tanah juga memicu ketegangan sosial di masyarakat. Kenaikan harga tanah secara drastis akibat spekulasi investasi membuat masyarakat lokal semakin sulit mempertahankan ruang hidupnya. Dalam beberapa kasus, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi untuk melepaskan tanah mereka, sementara manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh investor dan kelompok ekonomi besar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat dan risiko pembangunan.

Dalam perspektif ekologi politik, konflik agraria dalam pembangunan IKN memperlihatkan bagaimana negara dan kekuatan modal melakukan produksi ulang ruang melalui penguasaan wilayah strategis untuk kepentingan pembangunan nasional. Tanah dan hutan yang sebelumnya menjadi ruang sosial-ekologis masyarakat adat berubah menjadi komoditas pembangunan dan investasi. Akibatnya, masyarakat adat berpotensi mengalami marginalisasi struktural dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Apabila konflik agraria tersebut tidak diselesaikan secara adil dan partisipatif, pembangunan IKN berpotensi memunculkan konflik horizontal, gugatan hukum, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu legitimasi kebijakan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lahan dalam pembangunan IKN tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, pengakuan hak adat, dan keberlanjutan ekologis.

Marginalisasi Kelompok Lokal dalam Proses Pembangunan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga memunculkan persoalan marginalisasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Pembangunan yang seharusnya menjadi sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan justru berpotensi memperlemah posisi masyarakat lokal akibat dominasi pemerintah pusat, investor besar, dan kepentingan korporasi dalam pengelolaan proyek pembangunan.

Proses pembangunan IKN sejauh ini lebih banyak dikendalikan oleh aktor negara dan pemilik modal dengan orientasi percepatan pembangunan fisik dan investasi. Sementara itu, masyarakat lokal sering kali hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses tata kelola pembangunan masih cenderung bersifat sentralistik dan kurang partisipatif.

Akibat pembangunan infrastruktur dan ekspansi kawasan perkotaan, masyarakat lokal mulai kehilangan akses terhadap hutan, sungai, dan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Alih fungsi lahan menyebabkan perubahan pola ekonomi masyarakat, terutama bagi komunitas yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lokal. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan kebijakan dalam menjamin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Selain persoalan ekonomi, marginalisasi masyarakat lokal juga berdampak pada hilangnya kearifan ekologis tradisional. Masyarakat adat Dayak dan komunitas lokal Kalimantan memiliki sistem pengelolaan hutan dan lahan yang selama ini berbasis keberlanjutan, seperti sistem tebang pilih, larangan adat terhadap eksploitasi berlebihan, dan pola pemanfaatan lahan berbasis keseimbangan ekologis. Namun, masuknya proyek pembangunan berskala besar berpotensi menggeser praktik-praktik lokal tersebut dengan model pembangunan modern yang lebih eksploitatif terhadap sumber daya alam.

Minimnya transparansi informasi mengenai tata ruang, dampak lingkungan, dan arah pembangunan juga memperkuat keresahan masyarakat lokal. Banyak komunitas mengaku tidak memperoleh akses memadai terhadap informasi kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komunikasi publik dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan IKN.

Dalam perspektif keadilan lingkungan (*environmental justice*), marginalisasi masyarakat lokal menunjukkan adanya distribusi manfaat dan beban pembangunan yang tidak seimbang. Kelompok masyarakat yang paling dekat dengan kawasan pembangunan justru menjadi pihak yang paling rentan kehilangan ruang hidup dan menghadapi risiko ekologis, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemodal dan elite pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan IKN berpotensi menjadi simbol ketidakadilan sosial-ekologis apabila tidak diiringi dengan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat lokal. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat, pengakuan kearifan lokal, serta keberlanjutan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Kritik terhadap Kebijakan

Inkonsistensi dengan Komitmen Iklim Indonesia (NDC dan Paris Agreement)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan kritik serius terkait konsistensinya dengan komitmen iklim Indonesia di tingkat global. Pemerintah Indonesia melalui *Nationally Determined Contributions* (NDC) telah menyatakan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. (Syaharani & Tavares, 2020) Dalam komitmen tersebut, perlindungan hutan tropis dan restorasi lahan gambut menjadi strategi utama untuk menekan emisi karbon nasional.

Namun demikian, pembangunan IKN justru berpotensi memperbesar emisi karbon akibat deforestasi dan alih fungsi lahan gambut dalam skala besar. Pembukaan kawasan hutan primer untuk pembangunan infrastruktur, jalan, kawasan permukiman, dan fasilitas penunjang menyebabkan pelepasan karbon yang tersimpan dalam vegetasi dan tanah gambut selama puluhan hingga ratusan tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara agenda pembangunan nasional dengan komitmen penurunan emisi yang telah disepakati Indonesia dalam Perjanjian Paris.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya konsistensi kebijakan (*policy coherence*) antara kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan lingkungan hidup. Pemerintah di satu sisi mendorong agenda pembangunan rendah karbon dan transisi hijau, tetapi di sisi lain menjalankan proyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan tekanan ekologis secara signifikan. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih lebih dominan dibandingkan agenda keberlanjutan lingkungan.

Target restorasi sekitar 2 juta hektar lahan gambut yang sebelumnya menjadi bagian penting strategi mitigasi perubahan iklim Indonesia menjadi semakin sulit tercapai apabila pembangunan IKN terus mendorong konversi kawasan gambut dan hutan tropis. (Purnomo dkk., 2023) Dalam konteks ini, pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada lingkungan lokal Kalimantan Timur, tetapi juga memengaruhi posisi Indonesia dalam tata kelola perubahan iklim global.

Kritik lain muncul terkait minimnya transparansi pemerintah dalam menghitung dampak kumulatif emisi karbon dari pembangunan IKN terhadap target NDC nasional. Perhitungan emisi yang disampaikan pemerintah cenderung berfokus pada aspek operasional kota hijau dan penggunaan energi terbarukan, tetapi kurang mempertimbangkan emisi besar yang dihasilkan dari proses pembukaan lahan, konstruksi, dan perubahan tata guna lahan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas klaim IKN sebagai kota rendah karbon.

Status IKN sebagai “proyek strategis nasional” juga dinilai menciptakan preseden buruk dalam tata kelola lingkungan. Dalam praktiknya, proyek strategis nasional sering memperoleh berbagai kemudahan perizinan dan fleksibilitas regulasi yang berpotensi melemahkan pengawasan lingkungan. Akibatnya, perlindungan ekologis berisiko ditempatkan sebagai aspek sekunder dibanding percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Dalam perspektif ekologi politik, pembangunan IKN menunjukkan bagaimana negara cenderung menggunakan narasi pembangunan hijau sebagai legitimasi politik, sementara praktik pembangunan di lapangan tetap berorientasi pada ekspansi ruang ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks pembangunan berkelanjutan, yaitu ketika kebijakan yang diklaim mendukung transisi ekologis justru menghasilkan tekanan lingkungan baru.

Apabila kontradiksi tersebut terus berlangsung, pembangunan IKN berpotensi mengurangi kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional dalam isu perubahan iklim. Indonesia dapat dipandang mengalami inkonsistensi antara komitmen global dan implementasi kebijakan domestik. Dengan demikian, kritik terhadap pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif dan ekologis nasional, tetapi juga menyangkut legitimasi Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan global.

Lemahnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Kritik lain yang mengemuka dalam pembangunan IKN adalah lemahnya proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam prinsip administrasi publik dan tata kelola lingkungan, AMDAL seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara hati-hati, berbasis kajian ilmiah, dan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Namun dalam praktiknya, proses AMDAL IKN dinilai lebih berfungsi sebagai formalitas administratif dibanding instrumen pengendalian kerusakan lingkungan.

Proses penyusunan AMDAL IKN dinilai dilakukan secara terburu-buru dalam waktu relatif singkat untuk proyek pembangunan berskala besar dan kompleks. Kondisi tersebut menimbulkan kritik karena pembangunan IKN mencakup kawasan hutan tropis, lahan gambut, bekas tambang, serta wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi yang seharusnya memerlukan kajian multidimensional dan jangka panjang.

Salah satu kritik utama terhadap AMDAL IKN adalah tidak adanya kajian holistik mengenai dampak kumulatif pembangunan. Kajian lingkungan lebih banyak berfokus pada

dampak sektoral dan administratif, sementara perubahan ekologis bersifat sistemik. Padahal pembangunan IKN berpotensi mengubah sistem hidrologi regional, mempercepat hilangnya biodiversitas, meningkatkan pelepasan karbon skala besar, dan mengganggu keseimbangan ekosistem Kalimantan Timur secara menyeluruh.

Selain itu, kajian mengenai kerentanan bencana juga dinilai sangat minim. Risiko banjir, kebakaran hutan, subsiden tanah, hingga potensi likuifaksi belum dianalisis secara mendalam dalam dokumen AMDAL. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan lebih berorientasi pada percepatan pembangunan fisik dibanding prinsip mitigasi risiko ekologis. Dalam perspektif administrasi publik, lemahnya pengkajian risiko memperlihatkan kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam kebijakan pembangunan.

Persoalan lain terletak pada partisipasi publik yang dinilai cacat secara prosedural. Akses masyarakat terhadap dokumen AMDAL sangat terbatas, waktu konsultasi publik relatif singkat, dan berbagai rekomendasi masyarakat adat serta organisasi lingkungan tidak sepenuhnya diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, proses partisipasi publik cenderung bersifat simbolik dan belum mencerminkan prinsip deliberatif dalam tata kelola kebijakan publik.

Dalam konteks *good governance*, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas kebijakan lingkungan. AMDAL yang seharusnya menjadi ruang dialog antara negara, masyarakat, dan ahli lingkungan justru lebih banyak menjadi instrumen administratif untuk mempercepat legitimasi pembangunan. Hal ini memperlihatkan dominasi pendekatan developmentalisme yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dibanding perlindungan lingkungan.

Selain itu, lemahnya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum lingkungan juga memperbesar risiko kerusakan ekologis jangka panjang. Tidak adanya sistem pengawasan yang kuat menyebabkan potensi pelanggaran lingkungan sulit dikendalikan secara efektif. Dalam kondisi demikian, AMDAL berisiko kehilangan fungsi substantifnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, kritik terhadap AMDAL IKN memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lingkungan pembangunan nasional. AMDAL tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pencegahan kerusakan ekologis, tetapi lebih sebagai “tiket legal” untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan IKN masih didominasi oleh paradigma pembangunan eksploitatif yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis.

Kontradiksi antara Narasi “Kota Berkelanjutan” dan Realitas Ekologis

Penelitian ini menemukan adanya kontradiksi mendasar antara narasi pembangunan IKN sebagai “kota berkelanjutan” dengan realitas ekologis yang muncul dalam proses implementasinya. Pemerintah secara konsisten membangun citra IKN sebagai *smart forest city*, kota hijau, dan simbol pembangunan masa depan berbasis keberlanjutan. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa praktik pembangunan justru memperlihatkan kecenderungan eksploitasi lingkungan dan marginalisasi sosial.(Nurron dkk., 2025b)

Paradoks pertama terlihat pada kontradiksi antara klaim ramah lingkungan dan praktik alih fungsi lahan gambut serta hutan primer. Narasi kota hijau bertabrakan dengan realitas pembukaan kawasan ekologis yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Indonesia yang berkomitmen terhadap Perjanjian Paris justru menjalankan proyek pembangunan yang berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan pelepasan karbon. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dalam pembangunan IKN lebih banyak hadir sebagai retorika kebijakan dibanding implementasi ekologis yang nyata.

Paradoks kedua muncul pada konsep *smart city* yang tidak diimbangi dengan perhatian memadai terhadap daya dukung ekosistem lokal.(Bangun, 2024) Pembangunan kota cerdas dilakukan di kawasan dengan kerentanan ekologis tinggi, seperti lahan gambut, kawasan rawan kebakaran hutan, dan wilayah berisiko banjir serta likuifaksi. Dalam konteks ini, pembangunan modern justru dilakukan di atas fondasi ekologis yang rapuh. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan teknologi dan infrastruktur belum sepenuhnya mempertimbangkan batas ekologis kawasan.

Paradoks ketiga berkaitan dengan klaim pemerataan ekonomi yang justru mengabaikan kearifan lokal masyarakat adat. Pemerintah mempromosikan IKN sebagai solusi ketimpangan pembangunan nasional, tetapi dalam praktiknya masyarakat lokal menghadapi risiko marginalisasi, kehilangan ruang hidup, dan berkurangnya akses terhadap sumber daya alam. Kearifan ekologis masyarakat adat dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan tidak ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Kontradiksi paling mendasar dari pembangunan IKN terletak pada upaya menciptakan kota masa depan di atas ekosistem yang sedang dirusak untuk pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang diklaim berkelanjutan justru dilakukan melalui praktik eksploitasi ruang ekologis dalam skala besar. Hal ini menunjukkan kegagalan paradigma pembangunan dalam memahami prinsip dasar ekologi bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai dengan melawan daya dukung alam.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara narasi kebijakan dan realitas implementasi. Pembangunan IKN menunjukkan bagaimana negara menggunakan retorika pembangunan hijau dan modernisasi sebagai instrumen legitimasi politik, sementara aspek ekologis dan keadilan sosial belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam tata kelola pembangunan.

Dengan demikian, kontradiksi antara narasi “kota berkelanjutan” dan realitas ekologis menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek pemindahan ibu kota, tetapi juga cerminan pertarungan antara paradigma pertumbuhan ekonomi dan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan publik Indonesia kontemporer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis kebijakan dan studi literatur sehingga belum melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung dari masyarakat adat, komunitas lokal, maupun pemangku kepentingan yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek narasi kebijakan dan potensi dampak ekologis sehingga belum mengkaji secara mendalam dampak sosial-ekonomi, perubahan struktur mata pencaharian masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan lingkungan setelah pembangunan berlangsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods atau penelitian lapangan yang melibatkan wawancara mendalam, survei, dan observasi langsung guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji efektivitas penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, tata kelola lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, serta evaluasi terhadap kebijakan mitigasi ekologis yang diterapkan pemerintah. Selain itu, studi longitudinal sangat diperlukan untuk memantau perubahan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan IKN yang transparan, partisipatif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anirwan, A., Aljurida, A. M. A., & Baharuddin, T. (2024). Developing a new capital city (IKN) in Indonesia: A thematic analysis. *Policy & Governance Review*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i1.863>
- Anshari, G. Z., Gusmayanti, E., Afifudin, M., Ruwaimana, M., Hendricks, L., & Gavin, D. G. (2022). Carbon loss from a deforested and drained tropical peatland over four years as assessed from peat stratigraphy. *CATENA*, 208, Article 105719. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105719>
- Bangun, I. C. (2024). Massive development of Nusantara Capital City in the perspective of ecological politics. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.17910>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold.
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. Pantheon Books.
- Gaveau, D. L. A., et al. (2022). Projected environmental impacts of Nusantara Capital City. *Nature Sustainability*. [Lengkapi volume, nomor, dan halaman jika tersedia].
- Hanna, P., & Vanclay, F. (2013). Human rights, Indigenous peoples and the concept of free, prior and informed consent. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 31(2), 146–157. <https://doi.org/10.1080/14615517.2013.780373>
- Harvey, D. (2005). *The neoliberal city*. Oxford University Press.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., Merjani, A., & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. <https://doi.org/10.1017/9781009157988>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023). *Kajian hidrologi kawasan IKN* [Laporan teknis].
- Martinez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781843765486>
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The limits to growth*. Universe Books.
- Noor, G. S. (2014). Perkembangan hutan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 307–314. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.307-314>
- Nurron, O. M., Ningrum, S., & Pancasilawan, R. (2025). Ibu Kota Nusantara: National capital development policy with the forest city concept. *Perspektif*, 14(1), 215–223. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12581>
- Peet, R., & Watts, M. (2004). *Liberation ecologies* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203235096>

- Purnomo, H., Puspitaloka, D., Junandi, B., Juniyanti, L., & Dharmawan, I. W. S. (2023). *Pembelajaran dari aksi restorasi gambut berbasis masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara*. CIFOR.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge University Press.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- SMERU Research Institute. (2023). *Dampak sosial-ekonomi pembangunan IKN*. SMERU Research Institute.
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. *Land*, 13(5), Article 606. <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib target emisi Indonesia: Pelemahan instrumen lingkungan hidup di era pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.212>
- Tree biodiversity in Bornean lowland forest: What are the key species for forest city development in the new capital city of Indonesia?* (n.d.). PLOS ONE. Diambil 23 Mei 2026, dari <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0320489>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). *Analisis dampak ekologis IKN*. WALHI.